

Alasan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Ke Tiongkok

Mardianus Yanto¹

Abstract: *This research aims to find out the reasons why Indonesia stopped exporting nickel to China. This research was designed to explain what factors were the reasons why Indonesia implemented a policy of stopping nickel ore exports to China. This research is explanatory qualitative writing using library research data collection techniques, namely collecting the necessary data and information through books, journals, articles and the internet. The type of data used is secondary data with qualitative data analysis techniques that construct and analyze data to obtain research results. The results of this research are that the reasons for the policy to stop Indonesian nickel exports to China are in the form of protection and bargaining in order to secure nickel ore raw materials and encourage the productivity of state-owned companies in order to improve Indonesia's relative position in the global market, which so far has not been running optimally. As well as maximizing nickel processing and attracting investment to support Indonesia as a production center for batteries and electric vehicles so that Indonesian nickel has added value*

Keywords: *Export Policy, Nickel, China, Indonesia*

Pendahuluan

Kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) merupakan salah satu teknologi yang saat ini berkembang pesat dan menjadi perhatian dunia karena dianggap dapat menjadi pengganti yang ideal untuk kendaraan konvensional yang berbasis Internal Combustion Engine (ICE) yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun menjadi pilihan utama. Anggapan ini hadir karena banyak negara di dunia masih tergantung pada minyak bumi, tidak terkecuali Indonesia. Hadirnya kendaraan listrik menjadi angin segar bagi masyarakat dunia di tengah ketergantungan terhadap minyak bumi yang terus meningkat. Saat ini bahan baku dari baterai yang paling utama yaitu nikel yang secara masif dikembangkan oleh produsen baterai dan kendaraan listrik di seluruh dunia.

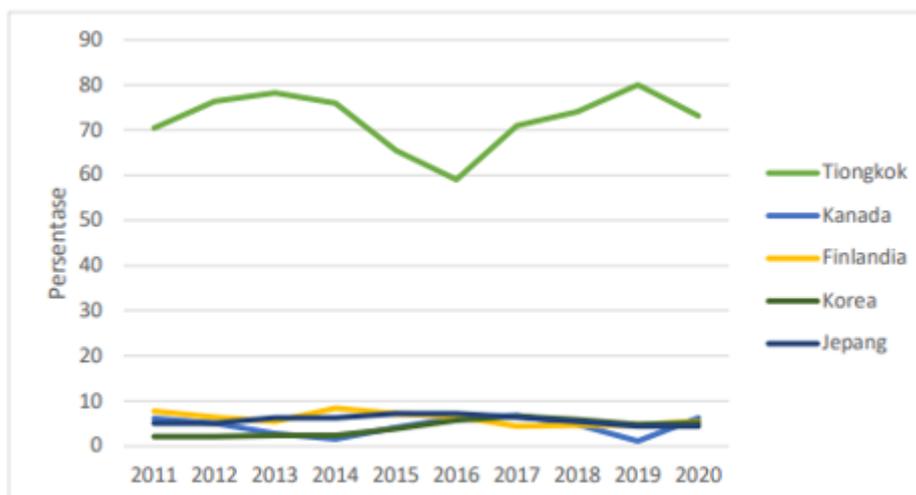
Indonesia sangat diuntungkan dengan momen perkembangan mobil listrik karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia sekaligus negara yang memiliki produksi nikel paling tinggi di dunia. Nikel sangat penting untuk pengembangan mobil listrik terutama dalam komponennya, yaitu baterai. Baterai lithium-ion yang merupakan teknologi baterai utama mobil listrik saat ini memerlukan banyak nikel untuk meningkatkan kapasitas energi, daya tahan, dan kinerja baterai secara keseluruhan. Nikel digunakan dalam katoda baterai untuk meningkatkan kapasitas energi dan daya tahan baterai.

Indonesia sendiri merupakan 10 besar dari negara penghasil nikel dunia dengan total cadangan 5,74 persen dari total cadangan dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sepanjang tahun 2019, Indonesia menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2019 produksi bijih nikel Indonesia mencapai 2,67 juta ton (Rully, 2020).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : aprin.ats@gmail.com.

Adapun negara tujuan ekspor nikel Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Australia dan terutama negara Uni Eropa, Finlandia, dimana sebagai importir terbesarnya adalah negara Tiongkok. Karena sebagai salah satu negara importir bijih nikel terbesar di dunia. Sebagian besar nikel yang didapat berasal dari Indonesia. Tercatat, impor nikel Tiongkok dari Indonesia mencapai 3.989.894ton atau hampir 4 juta ton (Rahma, 2022).

Grafik 1. Negara Importir Utama Bijih dan Konsentrat Nikel



Sumber: LPEM FEB UI (2021)

Akan tetapi, semenjak 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel dengan komposisi kurang dari 1,7% berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Batasan ekspor ini diatur dalam Pasal 4 UU No. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/I/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan yang Telah Diolah dan Pemurnian, yang sebagian besar terkait dengan nikel (<1,7%) dan paling sedikit 30% dari total kapasitas input smelter. Peraturan terlampir menyoroti bahwa beberapa produk pertambangan, seperti nikel dengan kadar <1,7%, dikenakan pembatasan ekspor. Aturan ini terkait dengan alur kebijakan larangan ekspor kadar nikel <1,7%. Indonesia secara tidak langsung telah mengintimidasi ekspor komoditas nikel karena pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK nikel hanya diperbolehkan dan mendapat persetujuan ekspor jika minimal menggunakan nikel. Dengan kandungan kurang dari 1,7%, minimal 30% dari seluruh kapasitas masukan peleburan (PMP, 2017).

Kerangka Teori

Neo-Merkantilisme

Neo-Merkantilisme adalah pembaruan dari strategi merkantilisme yang digunakan oleh kebanyakan negara di masa perdagangan internasional yang liberal. Merkantilisme punya dua turunan teori. Turunan yang pertama yaitu perspektif kaum Merkantilis Klasik sedangkan turunan yang kedua adalah perspektif kaum Neo-Merkantilis. Kaum Neo-Merkantilis menganggap ekonomi global sebagai "*zero-sum game*", dan mereka melihatnya sebagai arena persaingan timbun-menimbun kekayaan daripada kerja sama negara. Kaum Neo-Merkantilis juga melihat keuntungan negara lain sebagai kerugian bagi negaranya (Ziegler & Menon, 2014).

Neo-Merkantilisme percaya akan keberadaan perdagangan bebas. Neo-Merkantilisme percaya bahwa tiap negara perlu melakukan transaksi keuangan yang terbuka guna memperkuat perekonomian negara masing-masing. Neo-Merkantilisme mendukung negara untuk mengimplementasikan kebijakan proteksionisme dengan tujuan agar perekonomian nasional si negara itu dapat terdorong dan terjaga. Proteksionisme yang terdapat dalam Neo-Merkantilisme cenderung ingin melindungi industri dalam negeri dengan menggunakan kebijakan Tariff Barrier (TB) dan kebijakan Non-Tariff Barrier (NTB). Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk Non-Tariff Barrier (NTB), seperti pengurangan kuota, ketentuan teknis, harga patokan (customs value), peraturan kesehatan atau karantina, dll.

Teori Bargaining

Bargaining adalah prosedur di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Selama proses negosiasi, masing-masing pihak berupaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dalam bisnis, bargaining adalah penawaran formal yang dilakukan ketika dua pihak atau lebih ingin menegosiasikan perjanjian bisnis, seperti harga pembelian atau penjualan barang dan jasa. Selama prosedur ini, masing-masing pihak berupaya memaksimalkan keuntungan dengan menawar harga lebih tinggi atau memberikan keuntungan tambahan (Silvia, 2023).

Kepercayaan, komunikasi, keadilan, dan otoritas adalah beberapa gagasan mendasar yang mengatur bargaining. Kepentingan yang berbeda, ketergantungan, sumber daya yang terbatas, kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sama, perbedaan budaya dan latar belakang, serta persaingan semuanya dapat menjadi elemen motivasi untuk melakukan bargaining.

- a. Perundingan dapat difasilitasi oleh perbedaan kepentingan antar pihak.
- b. Ketergantungan
- c. Sumber daya yang terbatas
- d. Kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama dapat mendorong negosiasi.
- e. Perbedaan budaya dan latar belakang dapat menghasilkan negosiasi yang efektif.
- f. Persaingan, ketika ada banyak pihak yang terlibat, hal ini mungkin akan meningkatkan negosiasi.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksplanatif, untuk menjelaskan alasan yang membuat Indonesia memberlakukan kebijakan penghentian ekspor nikelnya ke Tiongkok tahun 2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Produksi Nikel di Indonesia

Nikel merupakan bahan baku industri penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi, merupakan komoditas strategis. Cadangan nikel Indonesia melimpah karena lokasinya di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dan subtropics (Hanif, 2019). 70% dari sumber daya nikel benua dan 40% dari 1 juta ton nikel yang diproduksi

di dunia berasal dari nikel laterit yang tersebar di Indonesia (Elias, 2002). Untuk mencegah pertumbuhan permintaan energi yang tidak konsisten, pemerintah setiap negara menerapkan kebijakan untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi (Puariesthaufani N et al., 2022). Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya ambisi negara-negara di seluruh dunia untuk memulai transisi ke energi terbarukan. Karena cadangan nikel yang besar di Indonesia, produksi nikel di negara itu terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun Indonesia memiliki banyak nikel, pengolahan nikel membutuhkan banyak tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Karena Indonesia tidak dapat mengolah nikel secara mandiri, negara Indonesia bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, Brazil, dan Jepang untuk memaksimalkan produksinya.

Sebelum diberlakukannya aturan proteksi (hilirisasi) pengolahan dan ekspor nikel di Indonesia, nikel Indonesia diekspor dalam bentuk bijih mentah ke negara-negara yang membutuhkannya. Namun bijih nikel mentah akan diolah menjadi baja tahan karat untuk digunakan pada industri rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan industri, Indonesia mengimpor kembali peralatan rumah tangga berbahan baja tahan karat dari negara pengimpor nikel. Hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia karena harus mengimpor pasokan industri dari negara produsen nikel.

Ekspor Nikel Indonesia ke Tiongkok

Ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok memiliki latar belakang yang sangat menarik dan kompleks, melibatkan faktor ekonomi, geopolitik, dan lingkungan. Indonesia memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan logam besar Tiongkok karena negara ini adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

Sejak tahun 2014, Indonesia menjadi salah satu produsen utama nikel di Tiongkok, telah memainkan peran penting dalam membentuk dinamika perdagangan komoditas ini. Pada awalnya, perdagangan nikel antara Indonesia dan Tiongkok bersifat bilateral dan didorong oleh kebutuhan pasar (Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto & Nur Fauziah, 2021). Dinamika ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok mencerminkan hubungan yang kompleks antara dua negara ini dalam konteks perdagangan komoditas mineral. Indonesia telah menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia, dan Tiongkok, sebagai konsumen utama nikel global, memiliki ketergantungan yang signifikan pada impor nikel dari Indonesia. Dengan pertumbuhan cepat sektor kelistrikan di Tiongkok, permintaan terhadap nikel untuk aplikasi ini semakin meningkat. Pentingnya nikel dalam sektor-sektor kunci ini membuat Tiongkok menjadi salah satu konsumen utama di pasar global. Ketergantungan yang tinggi pada impor nikel, khususnya dari produsen nikel terkemuka seperti Indonesia, menandakan hubungan yang erat antara kebutuhan industri Tiongkok dan pasokan nikel dari negara-negara produsen (Suprpto et al., 2023).

Dampak Ekspor Nikel Mentah

Ekspor nikel mentah telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu industri yang sangat penting dalam perekonomian beberapa negara, termasuk Indonesia. Namun, mengekspor nikel mentah tanpa melalui proses hilirisasi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Ekspor nikel mentah dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Proses penambangan nikel mentah dapat menghasilkan limbah berupa debu, air, dan gas yang dapat mencemari udara, air,

dan tanah. Ekspor nikel mentah juga dapat memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Contohnya, penambangan nikel dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, seperti dengan mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan.

Ekspor nikel mentah juga dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian beberapa negara. Contohnya, harga nikel mentah yang fluktuatif dapat mempengaruhi harga produk yang menggunakan nikel sebagai bahan baku, seperti baja. Selain itu, ekspor nikel mentah juga dapat menghasilkan defisit balance of payment (BOP) beberapa negara, seperti di Indonesia yang telah mengalami defisit BOP sejak beberapa tahun terakhir.

a. Ketersediaan Nikel Terbatas

Dampak ekspor nikel mentah terhadap ketersediaan nikel Indonesia yang terbatas adalah penipisan cadangan nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi jika dilakukan penambangan terus-menerus, cadangan tersebut akan habis dalam waktu 7,3 tahun dihitung dari tahun 2022. Banyak negara membutuhkan nikel karena merupakan bahan baku alami yang penting. Saat ini, pertumbuhan industri kendaraan energi baru di seluruh dunia menunjukkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan sumber daya nikel. Ketidakseimbangan ini menghambat pertumbuhan rantai industri nikel (Suryanto, E. 2022).

b. Keberlanjutan Lingkungan

Ekspor nikel mentah berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pertambangan nikel yang kian masif telah menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan di wilayah tambang dan sekitarnya. Kerusakan lingkungan ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola produksi nikel di hulu maupun hilir serta kurangnya perhatian terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, penambangan nikel juga dapat menghasilkan limbah yang berbahaya, seperti tailing nikel, yang dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah. Dampak lainnya dari ekspor nikel mentah adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan air yang besar dalam proses pengolahan nikel. Proses High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang digunakan untuk mengolah nikel memerlukan sekitar lebih dari 1.700 liter air, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah.

c. Keterbatasan Pengembangan Industri

Salah satu sumber daya alam yang paling berharga adalah nikel, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, ekspor nikel mentah dapat memiliki dampak negatif terhadap pengembangan industri di Indonesia. Pertama, ekspor nikel mentah dapat menghambat pengembangan industri lainnya di Indonesia. Dengan mengexport nikel mentah, Indonesia tidak dapat mengembangkan industri yang memerlukan bahan baku nikel, seperti industri baja dan industri kimia. Kedua, ekspor nikel mentah dapat menghambat pengembangan teknologi di Indonesia. Dengan mengexport nikel mentah, Indonesia tidak dapat mengembangkan teknologi yang terkait dengan pengolahan nikel, seperti teknologi pengolahan bijih nikel dan teknologi produksi baja. Ketiga, ekspor nikel mentah dapat menghambat pengembangan lapangan kerja di Indonesia. Dengan mengexport nikel mentah,

d. Ketergantungan Pada Ekspor Mentah

Ekspor nikel mentah Indonesia meningkatkan ketergantungan pada ekspor mentah karena Indonesia tidak memiliki fasilitas pengolahan nikel yang memadai. Oleh

karena itu, nikel mentah yang diekspor harus diolah di negara lain, sehingga Indonesia harus mengimpor produk yang diolah dari negara lain. Ketergantungan pada ekspor mentah ini meningkatkan biaya dan risiko, serta mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengendalikan harga dan kualitas produk. Dampak lain dari ekspor nikel mentah terhadap ketergantungan pada ekspor mentah adalah meningkatnya biaya dan risiko. Ekspor nikel mentah meningkatkan biaya karena Indonesia harus mengimpor produk yang diolah dari negara lain. Selain itu, ekspor nikel mentah juga meningkatkan risiko karena Indonesia harus menghadapi risiko pasar global yang tidak stabil.

e. Mengurangi Nilai Tambah Domestik

Dalam kasus Indonesia, ekspor nikel mentah telah menimbulkan masalah ini. Nikel mentah yang diekspor tidak melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sehingga nilai tambah dari produk ini tidak dapat diperoleh. Akibatnya, Indonesia kehilangan kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk ini dan mengalami kerugian ekonomi. Dampak lain dari ekspor nikel mentah adalah pengurangan pendapatan negara. Ekspor nikel mentah tidak memberikan kontribusi pada pendapatan negara karena tidak melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Selain itu, ekspor nikel mentah juga dapat mengganggu stabilitas pasokan nikel domestik. Ketika nikel mentah diekspor, pasokan nikel di dalam negeri berkurang, sehingga industri domestik yang memerlukan bahan baku ini harus mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dan gangguan operasional, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas industri.

Analisis dan Hasil Temuan

Indonesia adalah eksportir komoditas bijih nikel terbesar di dunia. Namun, ekspor bijih nikel belum menghasilkan kegunaan yang signifikan untuk ekonomi Indonesia (Gumelar, 2014; Haryadi & Yunianto, 2017). Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, Indonesia melakukan ekspor hanya dalam bentuk barang mentah dengan harga yang dianggap rendah. Kedua, kerugian ekonomi Indonesia meningkat karena nilai perdagangan yang tidak sesuai (Haryadi & Yunianto, 2017). Selain itu, pertumbuhan sektor pengolahan nikel dalam negeri cenderung stagnan karena Indonesia tergantung pada ekspor bijih nikel mentah. Hal ini kemudian menyebabkan daya saing yang rendah dan industri pengolahan nikel di Indonesia stagnan (Gumelar, 2014).

Kurangnya kemampuan pengolahan nikel di Indonesia akhirnya mendorong impor produk olahan nikel dari negara lain. Stainless steel dan nikel alloy adalah sebagian produk olahan nikel yang diimpor oleh Indonesia. Meskipun demikian, harga impor produk olahan nikel dianggap cukup tinggi. Sementara harga produk nikel sering mengalami tren naik, harga bijih nikel sering mengalami tren penurunan. Data menunjukkan bahwa perdagangan nikel di Indonesia belum mencapai puncaknya, karena harga ekspor biji nikel hanya 0,0121 kali harga impor produk olahan nikel pada tahun 2007, karena biaya impor produk olahan lebih tinggi berkali-kali lipat daripada pemasukan dari ekspor biji nikel. Oleh karena itu, Indonesia dirugikan oleh tingginya ketimpangan harga, karena negara itu memiliki banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada hanya memiliki komoditas (Haryadi & Yunianto, 2017).

Indonesia mendorong proses hilirisasi (pengolahan mineral) untuk mengatasi kurangnya penerimaan negara dengan ekspor bijih nikel mentah. Tiga alasan umum negara untuk hilirisasi adalah sebagai berikut: olahan produk strategis atau pemenuhan

domestik yang lebih murah, peningkatan keterampilan pengolahan bahan mentah, dan perubahan pendapatan negara (Östensson, 2019).

Antara tahun 2014 dan 2017, agenda hilirisasi Indonesia tidak terpenuhi. Menurut Prasetyo (2019), proses hilirisasi gagal karena smelter, fasilitas pemurnian mineral, dan mekanisme pendukung lainnya, seperti infrastruktur, sumber daya, perizinan, dan pasar, tidak sepenuhnya berkembang dalam waktu lima tahun. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 5 Tahun 2017 memudahkan proses ekspor untuk melegakan nikel setelah hilirisasi terbukti tidak berhasil. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 25 Tahun 2018 kemudian memperkuat kebijakan relaksasi ekspor komoditas nikel yang berlaku hingga 11 Januari 2022.

Menurut laporan, Indonesia mendirikan 17 smelter bijih nikel pada tahun 2019. Jumlah smelter tersebut mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan penangguhan ekspor bijih nikel. dan meluncurkan proyek hilir. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 untuk menghentikan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Peraturan ini menandakan hilirisasi dan percepatan penutupan ekspor bijih nikel Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan hilirisasi bisnis bijih nikel adalah untuk membangun lebih banyak smelter, membangun sektor baja tahan karat, mengembangkan baterai dan kendaraan listrik, serta memanfaatkan terak feronikel untuk memproduksi magnesium dan ferroalloy (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020).

Beberapa kondisi dampak dari ekspor nikel mentah telah menimbulkan perhatian pemerintah Indonesia. Dampak tersebut meliputi penurunan nilai tambah industri domestik, penurunan pendapatan negara, dan penurunan kualitas lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk membatasi ekspor nikel dengan cara memproteksi dan bargaining. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan nilai tambah industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Keputusan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global.

a. Proteksionisme

Meskipun setiap negara memiliki perspektif yang berbeda tentang strategi Neomerkantilisme, tujuan utama setiap negara dalam menerapkan kebijakan ekonomi Neomerkantilisme adalah untuk memperkuat posisi mereka di dunia. Negara ingin mengamankan bahan baku strategis dan membantu lebih banyak perusahaan milik negara seiring dengan pencapaian tujuan utamanya. Negara sering berusaha mengendalikan rute pasokan yang ada untuk memastikan pasokan dan harga yang stabil untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.

Pemerintah Indonesia melakukan intervensi di pasar komoditas nikel karena alasan ekonomi dan non-ekonomi. Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga memungkinkan negara melakukan intervensi di bidang pertambangan. Pemerintah Indonesia memilih melakukan intervensi pasar dengan mengambil kebijakan penghentian ekspor bijih nikel guna menjamin pasokan bahan baku dan meningkatkan produktivitas badan usaha milik negara.

1. Untuk Keamanan Komoditas Bijih Nikel

Bijih nikel adalah bagian penting dari produk nikel yang telah menjadi komponen strategis karena digunakan dalam berbagai industri. Perselisihan mengenai pasokan komoditas bijih nikel telah menyebabkan naiknya harga di pasar global (Lim, Kim, & Park, 2021). Persaingan memengaruhi ketersediaan bijih nikel selain kenaikan harga. Oleh karena itu, setiap negara kemudian menggunakan pendekatan tertentu untuk menjaga keamanan rantai pasokan komoditas bijih nikel mereka.

Untuk menjamin bahwa smelter-smelter di Indonesia menerima bijih nikel, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan subsidi dalam mekanisme bisnis smelter. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab untuk menetapkan tarif yang dapat diterima bagi pengusaha pertambangan yang memasok smelter.

2. Meningkatkan Produksi Perusahaan BUMN

Untuk memaksimalkan proses hilirisasi nikel, pemerintah Indonesia memilih membantu BUMN karena merupakan salah satu perpanjangan tangan negara. Di sisi lain, untuk memastikan bahwa perusahaan milik negara pada akhirnya menggantikan dominasi asing di industri bijih nikel, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan milik negara.

Bersamaan dengan hal tersebut, aturan dan perizinan yang lebih kompleks ditetapkan untuk perusahaan pertambangan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung bisnis BUMN. Perusahaan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Indonesia, dan pemerintah Indonesia memiliki posisi unggul. Perizinan usaha pertambangan dapat diberikan, diperpanjang, atau dicabut sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia (Nalle, 2016). Perusahaan-perusahaan lain selain BUMN perlu diatur dengan undang-undang yang lebih ketat saat menjalankan bisnis pertambangan di Indonesia, berkat kontrol pemerintah melalui regulasi yang ada. Sebagai gambaran PT. Vale Indonesia, yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendirikan fasilitas pengilangan dalam negeri, menjual dua puluh persen saham perusahaannya, dan mendapatkan izin resmi sebelum dapat melanjutkan investasinya di Indonesia.

b. Bargaining

Bargaining adalah proses komunikasi dan negosiasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Dalam konteks internasional, bargaining dapat terjadi antara negara-negara yang memiliki tujuan dan preferensi yang berbeda. Teori bargaining menjelaskan bahwa proses bargaining adalah hasil dari interaksi antara dua pihak yang memiliki tujuan dan preferensi yang berbeda.

Proses bargaining antara Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antara kedua negara. Proses bargaining antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan bahwa masing-masing pihak berupaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan strategi dan taktik yang sesuai. Indonesia menggunakan strategi diplomasi dan komunikasi yang aktif untuk meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, sementara Tiongkok menggunakan strategi investasi dan

perdagangan untuk meningkatkan akses ke pasar Indonesia (Indonesia-Tiongkok Economic and Trade Cooperation. 2022).

Studi ini juga menemukan bahwa proses bargaining ditandai dengan tingkat kerja sama yang tinggi, karena kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mengembangkan perjanjian pasokan jangka panjang, sementara Tiongkok telah memberikan bantuan teknis dan investasi untuk mendukung industri nikel di Indonesia.

1. Mengoptimalkan Hasil Pengolahan Nikel

Indonesia melarang ekspor nikel karena peningkatan pendapatan negara. Hal ini merupakan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri agar produk sektor pengolahan logam dan nilai ekspor dapat tumbuh dengan cepat. Menurut Agung dan Adi (2022), Indonesia melakukan ini untuk mencegah negara-negara yang mengkonsumsi nikel mengambil alih komoditas nikel, yang merupakan bahan baku industri penting dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Hak Indonesia untuk memiliki sumber daya alam secara keseluruhan dikaitkan dengan kebijakan pelarangan ekspor.

2. Menarik Investasi untuk Menjadikan Indonesia Pusat Produksi Baterai dan *Electric Vehicle*

Penggunaan nikel sebagai bahan bakar baterai diperkirakan akan meningkat hanya 6% di seluruh dunia pada tahun 2020, menjadi 26% pada tahun 2030, dan 36% pada tahun 2040. Semakin banyak orang yang menggunakan mobil berbasis bahan bakar listrik. Fenomena ini akan menguntungkan Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini bisa menjadi peluang untuk memproduksi baterai dan kendaraan listrik, serta mendatangkan investasi ke Indonesia. Fenomena ini akan menguntungkan Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini bisa menjadi peluang untuk memproduksi baterai dan kendaraan listrik, serta mendatangkan investasi ke Indonesia.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang menetapkan kembali kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan aturan tersebut, Indonesia secara resmi telah melarang ekspor nikel mentah. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 terus mengawasi pelaksanaan program hilirisasi. Pemerintah mencapai kesepakatan untuk membangun smelter dan memberlakukan larangan lebih ketat terhadap ekspor nikel mentah dalam upaya mencegah hilirisasi nikel di Indonesia dan mencegah pasokan nikel mentah ke pelanggan internasional.

Presiden Jokowi menjadikan potensi nikel Indonesia yang terbesar di dunia sebagai alat tawar-menawar. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan negara lain guna mendongkrak pendapatan negara. Oleh karena itu, kolaborasi dalam inisiatif investasi nikel kemungkinan besar akan menguntungkan perekonomian kedua negara. Investasi ini memberikan manfaat bagi Indonesia dengan meningkatkan pendapatan negara melalui proses hilirisasi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan.

Kesimpulan

Permintaan nikel terus meningkat sebagai hasil dari tren penggunaan kendaraan listrik untuk mencapai transisi energi global. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang kebijakan hilirisasi menetapkan proteksionisme nikel sebagai tanggapan atas kejadian tersebut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan hilirisasi digunakan untuk melindungi nikel Indonesia dalam perdagangan global. Tujuan program hilirisasi adalah untuk menghasilkan lebih banyak nilai dari nikel yang diolah. Selain itu, program hilirisasi membantu membangun ekosistem di Indonesia yang akan menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik di seluruh dunia. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga pasokan bijih nikel, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tukar rupiah melalui peningkatan aliran masuk domestik.

Daftar Pustaka

- Elias, M. (2002). Nickel laterite deposits – geological overview , resources and exploitation. Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, CODES Special Publication 4, 205–220
- Hanif, I. D. (2019). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia. JOM FISIP, 8(5), 55.
- Haryadi, H., & Yunianto, B. (2017). Analysis on terms of trade of Indonesia's nickel. Indonesian Mining Journal, 19(1), 51–64
- Kementerian ESDM. (2019a). Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020. Diambil dari Siaran Pers Kementerian ESDM No. 549.Pers/04/SJI/2019 website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>
- Östensson, O. (2019). Promoting downstream processing: resource nationalism or industrial policy? Mineral Economics, 32(2), 205–212.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/I/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- Puariesthaufani N, A., P Hadi Wibowo, R., & Anam, C. (2022). Quo Vadis Renewable Electricity In Southeast Asia: Policy Overview Of The Energy Transition Towards Zero Emissions. Journal of Comprehensive Science (JCS), 1(2), 236–248.
- Rahma, Atika. (2022). 4 Negara Tujuan Ekspor Indonesia, Cina Paling Besar. Diambil 26 Juni 2022, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/679931/34/4-negara-tujuan-ekspor-nikel-indonesia-china-paling-besar-1644289344>
- Rully R. Ramli. (2020). Sepanjang Tahun Lalu Indonesia Jadi Produsen Nikel Terbesar Dunia. Dambil 26 Juni 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/14/102900126/sepanjang-tahun-lalu-indonesia-jadi-produsen-nikel-terbesar-dunia?page=all> Richard C. Snyder, H.W.

- Bruck, Burton Sapin, 1962, *Foreign Policy Decision-Making, An Approach to the study of International Politics*, The Free Press of Glencoe.
- Subitmele, Silvia Estefina. (2023). Bargaining adalah Proses Negosiasi, Pahami Konsep, Faktor Pendorong dan Contohnya. Diambil 6 Juli 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5239215/bargaining-adalah-proses-negosiasi-pahami-konsep-faktor-pendorong-dan-contohnya>
- Suprpto, Y., Leona, M., Putra, S., Phang, S., & Loo, E. (2023). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Ekspor Ke Cina Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Negara Indonesia. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 607–612. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3967>
- Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, S., & Nur Fauziah, F. (2021a). Nilai Ekonomi Nikel Indonesia Akibat Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Deddy Ahmad Fajar. In *Jurnal Manajemen* (Vol. 1). Cetak. <https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/Jurnal-el-Idhara>
- Ziegler, C. E., & Menon, R. (2014). Neomercantilism and Great-Power Energy Competition in Central Asia and the Caspian. *Strategic Studies Quarterly*, 17–41.